

**KAJIAN STRATEGI PENGELOLAAN RETRIBUSI  
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)  
DI KAWASAN PENDIDIKAN TEMBALANG**

**TUGAS AKHIR**

**Oleh :**

**NI'AM SYIFAUL JINAN**

**NIM. L2D 004 338**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2008**

## ABSTRAK

*Keberadaan sektor informal berupa PKL di kawasan pendidikan Tembalang selama beberapa tahun terakhir berkembang pesat. Meningkatnya jumlah PKL di Tembalang mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor ini. Retribusi yang dihasilkan dari PKL juga merupakan salah satu sumber dana untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pengelolaan retribusi yang baik menjadi hal yang sangat menentukan keberhasilan peran dari retribusi PKL dalam menyokong pendapatan daerah yang pada nantinya juga akan digunakan untuk pembangunan daerah di seluruh sektor kehidupan terutama sektor perekonomian itu sendiri. Selama ini pengelolaan retribusi PKL di Tembalang belum menunjukkan ketegasan pola serta alur retribusi tersebut. Hal ini tercermin dari pencapaian target penerimaan retribusi PKL di kawasan ini yang kurang optimal. Bahkan untuk Kelurahan Tembalang, dari target yang ditentukan oleh Dinas Pasar Kota Semarang pada tahun 2007 adalah Rp. 450.000,- perbulan, realisasinya hanya sekitar Rp. 240.000,- (Data Target-Realisasi Retribusi PKL Kelurahan Tembalang Tahun 2007). Hal ini menjadi dasar diperlukannya studi untuk meneliti dan merumuskan strategi pengelolaan retribusi PKL di kawasan pendidikan Tembalang sebagai upaya meningkatkan kontribusinya dalam penerimaan PAD Kota Semarang.*

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pengelolaan retribusi PKL di Kawasan Pendidikan Tembalang sebagai upaya dalam meningkatkan kontribusi penerimaan retribusinya dalam PAD Kota Semarang. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan tahapan-tahapan yang merupakan sasaran penelitian ini, diantaranya mengidentifikasi karakteristik, potensi dan kendala pengelolaan retribusi, Kelembagaan pengelolaan retribusi PKL di Kawasan Pendidikan Tembalang, serta kontribusinya dalam PAD Kota Semarang dan kelembagaan pengelolaan retribusi PKL, pada akhirnya dilakukan perumusan strategi pengelolaan retribusi PKL di Kawasan Pendidikan Tembalang.*

*Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif dan normatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali sebanyak-banyaknya fakta di lapangan untuk selanjutnya dikaitkan dengan normatif/ undang-undang serta ketentuan yang semestinya. Analisis yang digunakan diantaranya analisis karakteristik PKL, analisis potensi dan kendala, analisis kelembagaan, dan analisis SWOT. Dari analisis yang dilakukan, diperoleh bahwa terdapat potensi dan kendala dalam pengelolaan retribusi PKL di kawasan Pendidikan tembalang, diantaranya tarif retribusi yang sangat mungkin ditingkatkan, ATP PKL yang mencapai angka 0,77%, Adanya kaitan fungsional setiap lembaga dalam pengelolaan retribusi PKL di Kawasan Pendidikan Tembalang dan peningkatan jumlah PKL setiap tahunnya sebagai potensi pengelolaan retribusi PKL, sedangkan kendala yang ada meliputi, Tidak ada anggaran operasional pengelolaan, frekuensi pemungutan yang tidak ideal serta sosialisasi dan koordinasi kurang. Disamping itu, dari analisis SWOT dihasilkan beberapa strategi, diantaranya membina juru pungut yang bermasalah, peningkatan kualitas pemungutan sehingga penerimaan retribusi dapat meningkat dan peningkatan tarif retribusi dengan memanfaatkan kemampuan membayar dari PKL.*

*Setelah dilakukan analisis-analisis tersebut, maka selanjutnya dilakukan sintesis untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi, diantaranya, Peningkatan kontrol dan pengawasan terhadap juru pungut, Alokasi dana anggaran untuk operasional pengelolaan, Mempermudah ijin PKL di tempat yang sesuai SK Walikota Semarang, Tertib Melakukan Pemungutan Retribusi, Peningkatan frekuensi pemungutan oleh juru pungut dengan pengoptimalan program pembinaan juru pungut dan Pembaharuan Peraturan Daerah*

*Key words: Perkembangan PKL, Pengelolaan Retribusi, Metode kualitatif, Strategi Pengelolaan, Tembalang*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan daerah dalam perkembangannya tidak terlepas dari pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan daerah merupakan salah satu modal utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Di berbagai daerah di Indonesia pembiayaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang diantaranya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Daerah, Pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. (UU No. 32 Tahun 2004)

Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah terbagi menjadi empat bagian, yaitu; hasil dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil badan usaha milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang pemungutannya dibebankan kepada orang atau badan yang menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah baik di sektor formal maupun informal.

Salah satu usaha informal yang tumbuh subur di berbagai kawasan di perkotaan adalah pedagang kaki lima (Kurniadi dan Tangkisilan, 2006:1). PKL sebagai salah satu bidang usaha informal juga memberikan sumbangsih bagi pendapatan daerah setempat dengan retribusi yang dipungut untuk selanjutnya masuk ke kas daerah. Pengelolaan retribusi PKL yang baik menjadi kunci utama dalam mendapatkan penerimaan retribusi PKL yang optimal. Selain itu pendekatan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan retribusi PKL juga menjadi hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai faktor yang menentukan dalam pengelolaan retribusi PKL ini.

Kota Semarang sebagai ibukota Propinsi Jawa Tengah saat ini mengalami pertumbuhan kota menuju ke arah kota metropolitan. Sehingga tidak dapat dipungkiri apabila arus migrasi ke Kota Semarang terus mengalir, karena Semarang memiliki banyak kawasan fungsional yang mampu menarik orang dari berbagai daerah di luar Semarang untuk datang. Tentu saja hal ini pula akan menyebabkan pertumbuhan lapangan kerja baik formal maupun sektor informal. Sebagian warga Semarang ataupun pendatang yang tidak mampu bersaing dalam usaha di sektor formal akan cenderung memilih mengembangkan usahanya di sektor informal. Hal ini dikarenakan dalam usaha informal pengusaha tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi dan keterampilan

khusus serta tidak diberi beban membayar pajak penghasilan sehingga masyarakat lebih memilih mengembangkan usaha di sektor ini, dimana salah satunya adalah menjadi pedagang kaki lima.

Namun perkembangannya tidak sesuai dengan penerimaan yang didapatkan dari retribusi PKL tersebut. dalam tiga tahun terakhir di Kota Semarang penerimaan retribusi PKL menunjukkan penurunan jumlahnya, bahkan untuk dua tahun terakhir tidak sesuai target yang ditetapkan oleh UP PKL Dinas Pasar. Pencapaian target penerimaan retribusi di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**TABEL 1.1**  
**PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI PKL KOTA SEMARANG**

NO.	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2005	1.356.868.800	1.358.243.550	100,1 %
2	2006	1.356.870.000	1.334.082.050	98,32 %
3	2007	1.356.870.000	1.159.484.110	85,45 %

*Sumber: UP PKL Kota Semarang*

Kawasan pendidikan Tembalang sebagai salah satu kawasan fungsional di Kota Semarang merupakan lokasi yang menarik berbagai kegiatan baru baik sektor informal maupun sektor formal di wilayah sekitarnya. Keberadaan sektor informal berupa PKL di kawasan pendidikan Tembalang selama beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat. Pesatnya perkembangan PKL di Tembalang mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor ini. Retribusi yang dihasilkan dari PKL juga merupakan salah satu sumber dana untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pengelolaan retribusi yang baik menjadi hal yang sangat menentukan keberhasilan peran dari retribusi PKL dalam menyokong pendapatan daerah yang pada nantinya juga akan digunakan untuk pembangunan daerah di seluruh sektor kehidupan terutama sektor perekonomian itu sendiri. Selama ini pengelolaan retribusi PKL di Tembalang belum menunjukkan ketegasan pola serta alur retribusi tersebut. Hal ini tercermin dari pencapaian target penerimaan retribusi PKL di kawasan ini yang kurang optimal. Bahkan untuk Kelurahan Tembalang, dari target yang ditentukan oleh Dinas Pasar Kota Semarang pada tahun 2007 adalah Rp. 450.000,- perbulan, realisasinya hanya sekitar Rp. 240.000,- (Data Target-Realisasi Retribusi PKL Kelurahan Tembalang Tahun 2007).

Sebenarnya untuk Kota Semarang sudah terbentuk perda yang mengatur pengelolaan dan pembinaan PKL yaitu Perda No 11 Tahun 2000 yang dijadikan pemerintah sebagai patokan untuk mengelola segala hal tentang PKL. Namun demikian, pelaksanaan ataupun realisasi penerimaan dari sektor retribusi PKL belum sepenuhnya

optimal. Hal ini menjadi dasar diperlukannya studi untuk meneliti dan merumuskan strategi pengelolaan retribusi PKL di kawasan pendidikan Tembalang sebagai upaya meningkatkan kontribusinya dalam penerimaan PAD Kota Semarang.

## 1.2. Perumusan Masalah

Perkembangan Kecamatan Tembalang sebagai kawasan pendidikan sangat pesat hal ini terbukti dengan adanya beberapa perguruan tinggi yang berdiri di kawasan Tembalang, diantaranya Universitas Diponegoro, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Kesehatan Widya Husada, STIE Cendikia Karya Utama dan Universitas Pandanaran. Sebagai sebuah kawasan fungsional tentunya Tembalang juga tidak mengabaikan kebutuhan akan fasilitas-fasilitas pendukung yang mampu memenuhi kebutuhan penduduknya yang sebagian besar merupakan mahasiswa. Perkembangan sektor pendidikan di Tembalang juga diiringi dengan berkembangnya sektor perekonomian informal yang berupa munculnya PKL. Sebagian besar PKL di Kawasan Pendidikan Tembalang melayani kebutuhan sehari-hari mahasiswa yang berada di sekitar kawasan ini. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa penduduk/ masyarakat umum di kawasan ini pun juga menjadi bagian dari konsumen PKL.

Rencana pemindahan kampus Undip Pleburan di jalan Imam Bardjo ke Kawasan Pendidikan Tembalang semakin mendorong berkembangnya sektor PKL. Hal ini terbukti dengan semakin bertambahnya jumlah PKL dari tahun ke tahun (Heryani: 2006). Meskipun demikian retribusi yang dihasilkan dari PKL ini tidak seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Di Kelurahan Tembalang saja dengan target yang dibebankan untuk tahun 2007 sebesar Rp. 450.000,- perbulan, penerimaan yang didapatkan hanya sekitar Rp. 240.000,-. Hal ini membuktikan bahwa terdapat suatu masalah dalam pengelolaan retribusi PKL di Kawasan Pendidikan Tembalang.

Pesatnya pertumbuhan PKL di Kawasan Pendidikan Tembalang yang tidak diiringi pencapaian target penerimaan retribusinya membuka mata terutama pemerintah untuk mengambil tindakan yang sesuai untuk mengelola potensi retribusi PKL di Tembalang yang sangat besar ini pada masa yang akan datang. Kebijakan-kebijakan yang diambil yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan retribusi PKL sangat menentukan pencapaian target penerimaan retribusi PKL tersebut. Menilik pada permasalahan tersebut, maka sangat penting untuk dikaji bahwa **bagaimana strategi pengelolaan retribusi PKL di Kawasan Pendidikan Tembalang sebagai upaya meningkatkan kontribusinya dalam penerimaan PAD Kota Semarang.**